



KEMENTERIAN UMKM REPUBLIK INDONESIA

KAJIAN HUKUM

Analisis Kebutuhan dan Dampak Penyusunan Peraturan Menteri UMKM tentang Verifikasi Badan Usaha Kecil dan Menengah yang Mengajukan Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dengan Cara Prioritas

A. Persoalan

Saat ini belum terdapat pengaturan teknis yang secara khusus mengatur mekanisme verifikasi administratif Badan Usaha Kecil dan Menengah (BUKM) dalam pengajuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) melalui mekanisme prioritas. Ketiadaan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan afirmasi bagi UMKM, khususnya dalam memastikan bahwa pelaku usaha yang memperoleh prioritas benar-benar memenuhi kriteria sebagai BUKM. Selain itu, belum adanya standar verifikasi administratif yang jelas berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antar pemangku kepentingan serta membuka ruang ketidaktepatan sasaran kebijakan afirmasi di sektor pertambangan.

B. Praanggapan

Telaahan ini disusun berdasarkan praanggapan sebagai berikut:

1. Pengaturan verifikasi administratif diperlukan untuk menjamin kebijakan afirmasi bagi UMKM dilaksanakan secara tepat sasaran, objektif, dan akuntabel.
2. Kejelasan mekanisme verifikasi akan meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan pelaku usaha terhadap kebijakan prioritas WIUP.
3. Pemisahan yang tegas antara verifikasi administratif dan evaluasi teknis pertambangan diperlukan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan.
4. Pemerintah memiliki kapasitas kelembagaan untuk melaksanakan verifikasi administratif sepanjang didukung dengan norma yang jelas dan terukur.

C. Fakta yang Mempengaruhi

Beberapa kondisi yang mempengaruhi kebutuhan pengaturan antara lain:

1. Perkembangan Kebijakan Pertambangan, kebijakan pertambangan telah membuka ruang afirmasi bagi UMKM dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk melalui mekanisme pemberian WIUP secara prioritas.
2. Kekosongan Norma Teknis, kebijakan afirmasi tersebut belum diikuti dengan pengaturan teknis yang menjelaskan tata cara verifikasi administratif pelaku usaha.
3. Tanpa pengaturan yang jelas, terdapat risiko ketidakkonsistenan penerapan kebijakan dan ketidakpastian bagi pelaku UMKM.
4. Kebutuhan Koordinasi Lintas Sektor, pengaturan verifikasi administratif memerlukan kejelasan batas kewenangan antar kementerian agar pelaksanaannya efektif dan tidak saling tumpang tindih.

D. Analisis

Berdasarkan kerangka pengaturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebutuhan pengaturan verifikasi administratif Badan Usaha Kecil dan Menengah dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Dalam kerangka penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengelolaan mineral dan batubara diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kebijakan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan cara prioritas kepada koperasi dan badan usaha kecil dan menengah merupakan perwujudan mandat konstitusional tersebut, sehingga diperlukan instrumen pengaturan yang menjamin kebijakan afirmasi tersebut berjalan secara adil dan tepat sasaran.
2. Pengaturan mengenai verifikasi administratif Badan Usaha Kecil dan Menengah diperlukan untuk mengisi kekosongan pengaturan teknis terkait pelaksanaan kebijakan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan cara prioritas. Ketiadaan mekanisme verifikasi yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan kelayakan pelaku usaha yang memperoleh prioritas.
3. Kebijakan afirmasi bagi UMKM di sektor pertambangan memerlukan instrumen verifikasi administratif agar pelaksanaannya tepat sasaran dan selaras dengan tujuan peningkatan perekonomian nasional serta pemerataan manfaat pengelolaan sumber daya alam. Tanpa pengaturan tersebut, terdapat risiko bahwa kebijakan prioritas tidak memberikan manfaat optimal bagi UMKM yang secara nyata memenuhi kriteria.
4. Verifikasi administratif diperlukan sebagai bentuk pemisahan kewenangan antara aspek administratif dan aspek teknis pertambangan. Kejelasan ini penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antar kementerian serta menjaga efektivitas koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan.
5. Pengaturan verifikasi administratif juga dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum bagi unit kerja pelaksana dalam menjalankan tugas verifikasi, sekaligus menjadi pedoman bagi pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan secara transparan dan terukur.
6. Secara konseptual, pengaturan verifikasi administratif berpotensi meningkatkan efektivitas kebijakan afirmasi apabila dirancang secara operasional dan implementatif, dengan tahapan yang jelas serta pembatasan ruang lingkup yang tegas pada aspek administratif.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan pengaturan dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengaturan verifikasi administratif Badan Usaha Kecil dan Menengah diperkirakan menimbulkan dampak sebagai berikut:

1. Dampak Positif
 - a. Pengaturan verifikasi administratif Badan Usaha Kecil dan Menengah diperkirakan meningkatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan cara prioritas, karena adanya mekanisme yang jelas untuk memastikan bahwa kebijakan afirmasi diberikan kepada badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai UMKM.
 - b. Pengaturan ini berpotensi meningkatkan ketepatan sasaran kebijakan afirmasi di sektor pertambangan dengan mencegah masuknya badan usaha yang secara substantif tidak memenuhi kriteria UMKM ke dalam skema prioritas WIUP, sehingga tujuan pemerataan akses pengelolaan sumber daya alam dapat tercapai secara lebih optimal.

- c. Dari aspek tata kelola, pengaturan verifikasi administratif diperkirakan memperkuat akuntabilitas dan transparansi proses pemberian prioritas WIUP melalui standar verifikasi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.
 - d. Pengaturan ini juga diperkirakan memperjelas pembagian kewenangan antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah dengan kementerian teknis di bidang pertambangan, khususnya melalui pemisahan antara verifikasi administratif dan evaluasi teknis pertambangan, sehingga dapat meminimalkan potensi tumpang tindih kewenangan.
 - e. Dari perspektif pemberdayaan ekonomi, pengaturan verifikasi administratif berpotensi memperkuat peran UMKM dalam pengelolaan sumber daya alam melalui perluasan akses yang lebih terstruktur dan terjamin terhadap WIUP prioritas, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kapasitas usaha, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan ekonomi lokal di sekitar wilayah pertambangan.
2. Dampak Negatif
- a. Pada tahap awal penerapan, pengaturan verifikasi administratif berpotensi menimbulkan peningkatan beban administratif, terutama apabila kapasitas kelembagaan dan sumber daya pelaksana belum sepenuhnya siap untuk menjalankan proses verifikasi secara konsisten dan tepat waktu.
 - b. Tanpa kejelasan pedoman teknis dan pembagian peran yang tegas, terdapat potensi terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan verifikasi administratif, yang dapat mempengaruhi keseragaman penerapan kebijakan di lapangan.
 - c. Pengaturan ini juga berpotensi menimbulkan tantangan koordinasi lintas sektor, khususnya dalam membedakan secara praktis antara kewenangan administratif dan kewenangan teknis pertambangan, apabila tidak didukung dengan mekanisme koordinasi yang memadai.
 - d. Oleh karena itu, diperlukan langkah mitigasi berupa penguatan koordinasi antar kementerian terkait, penyesuaian kapasitas kelembagaan, serta penyusunan pedoman teknis pendukung agar potensi dampak negatif tersebut dapat diminimalkan dan tujuan pengaturan dapat tercapai secara optimal.

E. Simpulan

Berdasarkan analisis kebutuhan dan dampak pengaturan serta dengan memperhatikan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Verifikasi Badan Usaha Kecil dan Menengah yang Mengajukan Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dengan Cara Prioritas merupakan kebutuhan normatif yang memiliki dasar konstitusional, yuridis, dan sosiologis yang jelas. Pengaturan mengenai verifikasi administratif Badan Usaha Kecil dan Menengah dalam pengajuan WIUP dengan cara prioritas secara normatif diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum dan menjamin efektivitas kebijakan afirmasi bagi UMKM. Pengaturan ini penting untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan sosial, serta tata kelola kebijakan yang akuntabel dan terukur.